BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 244/PID.B/PN.Sby TENTANG TINDAK PIDANA SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU

A. Analisis Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/PN.Sby. Tentang Tindak Pidana Sengaja Memakai Surat Palsu

Hakim adalah orang yang memegang kekuasaan kehakiman. Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim dalam pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalil bahwa hukum kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutus berdasarkan hukum, sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁶³

Hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa Tjong Suwun komulatif dalam menjatuhkan hukuman. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa dan menjadikan terdakwa menginsafi perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

---

⁶³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996),. 39

tersebut, adalah dilakukan dengan sengaja yaitu terdakwa mengetahui dan menghendaki atas perbuatannya, serta menyadari akan akibat yang menyertainya.

Menggunakan Surat Palsu Atau yang Dipalsukan Seolah – Olah Sura Itu Asli dan Tidak Dipalsukan yang Dapat Menimbulkan Kerugian :

Penggunaan surat palsu tersebut dapat mengakibatkan kerugian, pengertiannya adalah kerugian tersebut tidak harus benar – benar terjadi akan tetapi baru berupa kemungkinan saja atau potensi akan adanya kerugian sudah cukup, dan orang yang menggunakan surat tersebut harus mengetahui benar bahwa surat tersebut adalah palsu.

Berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah telah dibuktikan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2007 Terdakwa pernah memberikan Surat Kuasa kepada Yapi kusuma (saksi-5) yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat hak Milik No.: 211 Terdakwa memberikan Surat Kuasa Tersebut karena Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2005 telah membeli tanah sawah dari H. Abdul Syakur Sertifikat Hak Milik No.: 211 semula masih atas nama Haroe Pangai (alm) yang dahulu seluas 3.140 m², yang terletak di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo melalui perantara yaitu orang yang bernama Muin dengan harga Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah) dengan beberapa kali pembayaran dari H.Abdul Syakur. Majelis Hakim berpendapat sebenarnya Terdakwa mengetahui Akta No.: 03 dan Akta No.: 04 masing – masing tanggal 30 Agustus 2006 yang dibuat di

hadapan Notaris pangodo, SH (saksi-1) tersebut adalah palsu yang dipalsukan seolah – olah asli dan tidak dipalsukan, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat tersebut dengan cara menyerahkan surat atau Akta – Akta tersebut kepada Yapi Kusuma (saksi-5) sebagai kelengkapan Surat Kuasa tertanggal 13 Oktober 2007 yang salah satunya adalah bertujuan untuk mengurus Sertifikat Hak Milik No.: 211 atas nama Salman Haroen yang berada di Kantor PU Bina Marga Propinsi Jawa Timur.

Atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain yaitu Notaris Pangodo, SH (saksi-1) yang Aktanya dipalsukan yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berupa kerugian immateriil yaitu nama baiknya terganggu.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim selanjutnya yaitu hal - hal yang memberatkan dalam perkara ini tidak ada hal – hal yang memberatkan. Selanjutnya hal - hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa sebagai seorang perempuan yang lugu, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungna keluarga, Karena ketidaktahuannya Terdakwa terlalu percaya kepada orang lain, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hakim didalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah memberikan unsur – unsur yang terdapat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, Jo

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 yang menjerat diri terdakwa, namun hakim menjatuhkan hukumannya lebih ringna dibandingkan jaksa yakni selama 6 (enam) tahun penjara tetapi hakim hanya menjatuhkan 5 (lima) bula penjara. Hal ini melihat dari fakta – fakta persidangan bahwa terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melihat dari hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/PN.Sby tidak ada hal yang memberatkan. Adapun hal yang meringankan adalah sebagai berikut : terdakwa belum pernah dihukum dan bersifat sopan dalam persidangan, Terdakwa sebagai seorang perempuan yang lugu, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggunga keluarga, Karena ketidaktahuannya Terdakwa terlalu percaya kepada orang lain, Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 244/PID.B/2014/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Sengaja Memakai Surat Palsu

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Tjong Suwun dalam putusannya dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu, dan oleh hakim dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara.